

ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH SEBELUM DAN SAAT PANDEMI COVID-19

Muhammad Hamdan Sayadi¹⁾, Muhammad Bahrul Ulum²⁾, Rafika Sari³⁾

Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Indo Global Mandiri

E-mail: hamdansayadi@uigm.ac.id

Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Indo Global Mandiri

E-mail: bahrulu1994@uigm.ac.id

Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Indo Global Mandiri

E-mail: rafikasari@uigm.ac.id

Abstract

Local government financial statements can be used to measure the financial performance of a region whether it is classified as good or bad. This study aims to analyze and describe the performance of local governments in Sumatra using the ratio of regional financial dependence levels before and during the Covid-19 pandemic. This research is classified as a quantitative descriptive method and uses regional financial dependency ratios as an analytical tool. The results of research on the comparison of financial performance between 10 provinces on the island of Sumatra in 2019 and 2020 show that the financial performance of provinces located on the island of Sumatra has a very high financial dependence on the central government. The level of dependence has increased during the COVID-19 pandemic. The results of the analysis show that Aceh province with the best financial performance during the pandemic period is based on the regional financial dependence ratio with a ratio of 28.49%. The highest regional financial dependency ratio is in the Riau Islands province with a ratio of 65.39%. Further research is expected to expand and expand the research sample and use other indicators in analyzing the financial performance of local governments.

Keywords : Regional financial dependence ratio, Local government, pandemic covid-19

JEL Classification : H11

1. PENDAHULUAN

Halim dan Kusufi (2014) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan komponen pendapatan. Kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan anggaran menjadi tolak ukur dalam menilai kinerja keuangan. Kinerja keuangan yang baik dapat dicapai bersamaan dengan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat.

Pasal 2 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa pemerintah daerah diberikan

kewenangan menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Melalui otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan meningkatkan kreatifitas dan inovasi dalam mengelola keuangan, terutama dalam merealisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

APBD menuntut setiap pemerintah daerah mampu merealisasikan anggaran yang telah disahkan, khususnya pendapatan yang

menjadi sumber utama dalam merealisasikan anggaran belanja. Harjito dkk. (2020) menyatakan bahwa Kinerja keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh Pendapatan Asli Daerah, dimana setiap kenaikan kinerja keuangan kabupaten dan kota dikarenakan meningkatnya PAD daerah tersebut.

Kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dianalisis menggunakan analisis pendapatan berupa analisis varians (selisih) anggaran pendapatan, analisis pertumbuhan pendapatan, analisis rasio keuangan, dan analisis potensi pendapatan asli daerah. Penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah sangat penting dikarenakan bermanfaat bagi kelangsungan pemerintah daerah di masa mendatang, manfaatnya berupa berusaha melampaui kinerja yang telah dicapai pada tahun sebelumnya (Mahmudi, 2019).

Sayadi (2020) melakukan penelitian dengan membandingkan tingkat ketergantungan keuangan daerah pada provinsi yang ada di Pulau Sumatera dan Jawa. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa provinsi dengan kinerja keuangan terbaik menurut rasio ketergantungan keuangan daerah ialah DKI Jakarta. Kemudian provinsi Banten dan Jawa Tengah diposisi kedua dan ketiga.

Rosaliena dan Zulkifli (2019) melakukan penelitian tingkat ketergantungan keuangan daerah pada kabupaten Gunung Kidul. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan keuangan daerah kabupaten Gunung Kidul berada pada level sangat tinggi dengan rasio diatas 80%. Sayadi (2021) mengevaluasi pendapatan negara selama pandemi. Ketika pandemi covid-19, penurunan realisasi pendapatan negara turun signifikan sebesar 16.53%.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menguraikan kinerja pemerintah daerah di Sumatera menggunakan rasio tingkat ketergantungan keuangan daerah sebelum dan saat pandemic covid-19. Rasio tersebut dapat digunakan untuk mengetahui tingkat kemandirian suatu daerah. Penelitian ini

diharapkan dapat menjadi salah satu penilaian pemerintah dalam menghadapi situasi krisis.

2. TINJAUAN LITERATUR

Rasio ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah. Mahmudi (2019) menyatakan bahwa semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan /atau pemerintah provinsi.

Mahmudi (2019) menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban tertulis atas kinerja keuangan yang telah dicapai. Laporan keuangan harus disajikan secara tepat waktu dan dapat diandalkan serta informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus dapat dipercaya, tidak mengandung unsur manipulasi, tidak bias, dan terbebas dari salah saji material.

Salah satu pilar utama kokohnya perekonomian suatu negara adalah adanya akuntabilitas dari para pemangku kekuasaan. Setiap rupiah uang publik harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat yang telah memberikan uangnya untuk membiayai pembangunan dan menjalankan roda pemerintahan. Bentuk pertanggungjawaban tersebut diwujudkan melalui penyajian laporan keuangan.

Laporan keuangan pemerintah daerah dapat digunakan untuk mengukur kinerja keuangan suatu daerah apakah tergolong baik atau buruk. Melalui laporan keuangan, suatu daerah dapat diketahui apakah sudah menjalankan otonomi daerah dalam hal keuangan atau belum. Salah satu cara atau metode untuk menentukan apakah suatu daerah sudah menjalankan otonomi daerah dalam hal keuangan atau belum ialah analisis rasio ketergantungan keuangan daerah.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini tergolong metode deskriptif kuantitatif. Metode ini bertujuan mengumpulkan data, kemudian dengan data tersebut dapat dijelaskan karakteristik situasi atau keadaan tertentu (Sekaran dan Bougie, 2017). Populasi dan sampel dalam penelitian ini ialah 10 provinsi yang ada di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan pemerintah daerah 10 provinsi di Indonesia yang diperoleh melalui website Badan Pusat Statistik www.bps.co.id.

Penelitian ini akan dianalisis dengan rasio ketergantungan keuangan daerah. Mahmudi (2019) menyatakan bahwa rasio ketergantungan keuangan daerah dapat dihitung dengan membagi jumlah pendapatan transfer terhadap jumlah pendapatan daerah. Rumus rasio ini adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Sementara kriteria-kriteria yang dipakai untuk mendeskripsikan rasio ketergantungan keuangan daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Kategori tingkat ketergantungan keuangan daerah

| Ketergantungan (%) | Kategori |
|--------------------|---------------|
| 0,00 – 10,00 | Sangat rendah |
| 10,01 – 20,00 | Rendah |
| 20,01 – 30,00 | Sedang |
| 30,01 – 40,00 | Cukup tinggi |
| 40,01 – 50,00 | Tinggi |
| > 50,00 | Sangat tinggi |

Sumber: Banga (2017)

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada 10 provinsi di pulau Sumatera dengan menganalisis Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun 2019 dan 2020 menggunakan rasio ketergantungan keuangan daerah.

Jika rasio ini semakin besar, maka tingkat ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat juga semakin besar (Mahmudi, 2019). Kinerja keuangan provinsi di pulau Sumatera periode sebelum dan saat pandemi dapat dilihat pada tabel 2.

Setelah menganalisis rasio ketergantungan keuangan daerah pada 10 provinsi di pulau Sumatera periode sebelum dan saat pandemi, selanjutnya peneliti mengelompokkan persentase ketergantungan berdasarkan katerogi-kategori yang dapat dilihat pada tabel 3. Berdasarkan tabel 3, terdapat 1 provinsi yang memiliki tingkat ketergantungan sedang dan 1 provinsi dengan tingkat ketergantungan tinggi. Sedangkan 8 provinsi lainnya memiliki tingkat ketergantungan yang sangat tinggi.

Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa provinsi Aceh dengan kinerja keuangan terbaik periode saat pandemi berdasarkan rasio ketergantungan keuangan daerah dengan rasio 28,49%. Provinsi Aceh masuk kategori sedang. Kemudian provinsi Bengkulu dengan rasio 48,09% masuk kategori tinggi untuk tingkat ketergantungan keuangan daerah.

Sementara itu, kinerja keuangan terburuk periode saat pandemi covid-19 berdasarkan rasio ketergantungan keuangan daerah diisi oleh provinsi-provinsi seperti, Bangka Belitung dengan rasio 51,85%, Sumatera Utara dengan rasio 56,94%, Sumatera Selatan dengan rasio 60,28%, Lampung dengan rasio 60,38%, Riau dengan rasio 62,61%, Sumatera Barat dengan rasio 62,92%, dan Jambi dengan rasio 65,39%. Rasio ketergantungan keuangan daerah yang paling tinggi berada pada provinsi Kepulauan Riau dengan rasio 65,39%.

4.2 Pembahasan

Analisis kinerja keuangan menggunakan rasio ketergantungan keuangan daerah menunjukkan bahwa terdapat tingkat perbedaan ketergantungan yang sangat nyata antara periode sebelum dan saat pandemic covid-19 pada provinsi di Pulau Sumatera.

Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa provinsi Aceh dengan kinerja keuangan terbaik periode saat pandemi berdasarkan rasio ketergantungan keuangan daerah dengan rasio 28,49%. Provinsi Aceh masuk kategori sedang. Kemudian provinsi Bengkulu dengan rasio 48,09% masuk kategori tinggi untuk tingkat ketergantungan keuangan daerah.

Tabel 2. Perkembangan tingkat ketergantungan sebelum dan saat pandemic

| No | Provinsi | 2020 | 2019 | Kenaikan/ penurunan (%) |
|----|-----------------|--------|--------|-------------------------------|
| 1 | Aceh | 28.49% | 27.16% | 1.33% |
| 2 | Sumut | 56.94% | 55.82% | 1.13% |
| 3 | Sumbar | 62.92% | 63.02% | -0.11% |
| 4 | Riau | 62.61% | 59.02% | 3.58% |
| 5 | Jambi | 64.25% | 63.31% | 0.94% |
| 6 | Sumsel | 60.28% | 61.45% | -1.17% |
| 7 | Bengkulu | 48.09% | 52.12% | -4.03% |
| 8 | Lampung | 60.38% | 36.15% | 24.23% |
| 9 | Bangka Belitung | 51.85% | 64.67% | -12.82% |
| 10 | Kepulauan Riau | 65.39% | 65.53% | -0.15% |

| | | | |
|----|-----------------|--------|---------------|
| 3 | Bangka Belitung | 51.85% | Sangat tinggi |
| 4 | Sumut | 56.94% | |
| 5 | Sumsel | 60.28% | |
| 6 | Lampung | 60.38% | |
| 7 | Riau | 62.61% | |
| 8 | Sumbar | 62.92% | |
| 9 | Jambi | 64.25% | |
| 10 | Kepulauan Riau | 65.39% | |

Sementara itu, kinerja keuangan terburuk periode saat pandemic covid-19 berdasarkan rasio ketergantungan keuangan daerah diisi oleh provinsi-provinsi seperti, Bangka Belitung dengan rasio 51,85%, Sumatera Utara dengan rasio 56,94%, Sumatera Selatan dengan rasio 60,28%, Lampung dengan rasio 60,38%, Riau dengan rasio 62,61%, Sumatera Barat dengan rasio 62,92%, dan Jambi dengan rasio 65,39%. Rasio ketergantungan keuangan daerah yang paling tinggi berada pada provinsi Kepulauan Riau dengan rasio 65,39%.

Pencapaian ini sejalan dengan Zukhri (2020) yang menemukan tingkat ketergantungan keuangan daerah di provinsi Bangka Belitung berada pada level sangat tinggi kepada pemerintah pusat. Provinsi Bangka Belitung memiliki tingkat ketergantungan keuangan diatas 50 persen, yaitu diantara 61,05-68,41 persen.

Otonomi daerah dalam hal keuangan provinsi yang terletak di pulau Sumatera secara umum memiliki tingkat ketergantungan yang sangat tinggi kepada pemerintah pusat. Salah satu penyebab utamanya ialah realisasi PAD provinsi di pulau Sumatera masih jauh dibawah kota-kota besar di pulau Jawa. Sulisty (2018) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah.

Tabel 3. Kategori tingkat ketergantungan keuangan daerah

| No | Provinsi | Tingkat ketergantungan keuangan daerah | |
|----|----------|--|----------|
| | | 2020 | Kategori |
| 1 | Aceh | 28.49% | Sedang |
| 2 | Bengkulu | 48.09% | Tinggi |

5. KESIMPULAN

Hasil penelitian dan pembahasan tentang perbandingan kinerja keuangan antara 10 provinsi yang ada di Pulau Sumatera pada tahun 2019 dan 2020 yang telah disajikan menunjukkan bahwa kinerja keuangan provinsi yang terletak di pulau Sumatera memiliki ketergantungan keuangan yang sangat tinggi pada pemerintah pusat. Level ketergantungan semakin meningkat ketika pandemic covid-19.

Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa provinsi Aceh dengan kinerja keuangan terbaik periode saat pandemi berdasarkan rasio ketergantungan keuangan daerah dengan rasio 28,49%. Provinsi Aceh masuk kategori sedang. Kemudian provinsi Bengkulu dengan rasio 48,09% masuk kategori tinggi untuk tingkat ketergantungan keuangan daerah.

Sementara itu, kinerja keuangan terburuk periode saat pandemi covid-19 berdasarkan rasio ketergantungan keuangan daerah diisi oleh provinsi-provinsi seperti, Bangka Belitung dengan rasio 51,85%, Sumatera Utara dengan rasio 56,94%, Sumatera Selatan dengan rasio 60,28%, Lampung dengan rasio 60,38%, Riau dengan rasio 62,61%, Sumatera Barat dengan rasio 62,92%, dan Jambi dengan rasio 65,39%. Rasio ketergantungan keuangan daerah yang paling tinggi berada pada provinsi Kepulauan Riau dengan rasio 65,39%.

Faktor yang mempengaruhi ketergantungan daerah dalam hal keuangan provinsi di pulau Sumatera masih sangat tinggi ialah kemampuan memperoleh PAD yang masih belum optimal sehingga membuat tingkat ketergantungan keuangan daerah yang sangat tinggi pada pemerintah pusat. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas dan memperbanyak sampel penelitian serta menggunakan indikator-indikator lainnya dalam menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah.

6. REFERENSI

- Halim, A dan Muhammad, S.,K. (2014). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat
- Harjito, Y., Putra, S., dan Yulianto. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Ekonomi*, 5(1), 19-28
- Mahmudi. 2019. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Nufus, K., Hadi, S., dan Awaluddin, M. (2017). Analysis of Financial Performance of Local Government through South Tangerang Calculation of Realization Regional Budget. *European Journal of Business and Management*, 9(3), 136-146
- Sayadi, M. H. (2020). Analisis perbandingan kinerja keuangan provinsi di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. *Jurnal Ekonomi Modernisasi*, 16(2), 96-104. DOI: 10.21067/jem.v16i2.4958
- Sayadi, M. H. (2021). APBN 2020: Analisis kinerja pendapatan negara selama pandemi covid-19. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 6(2), 159-171.
- Sekaran, Uma., dan Roger, B. 2017. *Metode Penelitian Untuk Bisnis Buku I*. Jakarta: Salemba Empat
- Sekaran, Uma., dan Roger, B. 2017. *Metode Penelitian Untuk Bisnis Buku II*. Jakarta: Salemba Empat
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta
- Sulistyo, Agus T. (2018). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi

Kalimantan Timur. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 3(1), 43-59.

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Wahab, L. O. A., Rofingatun, S dan Kreuta, B. (2017) Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Jayapura, *Jurnal Keuda*, 2(3), 1-12.

Zukhri, N. (2020). Kinerja keuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditinjau dari derajat kemandirian, ketergantungan, dan desentralisasi fiskal. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 5(2), 143-149.

Zulkarnain, Z. (2020). Analisis Rasio Keuangan Daerah Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa Barat. *CAKRAWALA*, 3(1), 61-74.